

INOVASI
Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi
(PASTI BERAKSI)



Nama Unit Pelayanan : Bappelitbangda Prov.Sulsel
Nama Inovator : Ir. Andi Darmawan Bintang,
MDevPlg
Kontak Person : 0812 4111 811
Email : darma_bin@yahoo.com

Tanggal Implementasi Inovasi
Friday, 18 January 2019
Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Kelompok Umum
Efektifitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB
URL Youtube
<https://youtu.be/v5xHwDJcqm8>
URL Bukti Iniasi Inovasi
<https://drive.google.com/drive/folders/1bg-dTPKx4GRVWUovkRsMlpvp2vz34RI-?usp=sharing>



Ringkasan

Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAKSI) merupakan pengembangan

dari program Gerakan kembali sekolah bekerja sama dengan UNICEF. Inovasi PASTI BERAksi dilaksanakan di 10 Kab/Kota dengan jumlah Anak Tidak Sekolah yang cukup tinggi pada usia 7 – 18 Tahun. Melalui inovasi ini, dilaksanakan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah formal dan non formal serta pencegahan anak tidak sekolah. Kabupaten/Kota lokus PASTI BERAksi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Pangkep, Sidrap, Wajo, Tana Toraja, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa dan Kota Makassar masing-masing 4 desa/kelurahan lokus.

Inovasi ini berdampak nyata pada pemanfaatan data berbasis SIPBM ATS yaitu ditemukannya jumlah ATS berdasarkan wilayah dan identitas keluarga. Inovasi ini juga berhasil meningkatkan efektivitas kolaborasi antara OPD dan pemangku kepentingan dalam lingkup Provinsi serta kolaborasi berjenjang antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dari hasil pendataan ditemukan ATS sebanyak 1.685 orang (laki-laki 1051 orang dan perempuan 634 orang) dan seluruhnya sedang berlangsung pengembalian ATS.

Inovasi PASTI BERAksi sesuai dengan kategori ke 2 yaitu Efektifitas institusi publik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Membangun Kolaborasi antar dan inter lingkup Pemerintahan dapat mengefektifkan implementasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan publik sektor Pendidikan.

Ide Inovatif

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda melaksanakan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAksi). Kegiatan ini menunjukkan upaya lintas sektor dan pemangku

kepentingan yang dikoordinir oleh Bappelitbangda berkolaborasi menyelesaikan permasalahan anak tidak sekolah yang jumlahnya masih sangat tinggi.

Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di 4 desa/kelurahan lokus di 10 kab/kota sebanyak 18.635 orang kemudian ditemukan jumlah ATS sebanyak 1.685 orang dan sedang ditangani proses pengembalian ke sekolah sebanyak 1.685 orang.

Permasalahan ATS merupakan masalah bidang pendidikan yang selama ini ditangani oleh satu atau dua sektor saja tanpa melibatkan sektor dan pemangku kepentingan lainnya serta tanpa berkolaborasi sehingga penanganan ATS berjalan dengan lambat dan sulit mencapai target yang diharapkan. Dengan adanya inovasi PASTI BERAksi, maka multisektor dan para pemangku kepentingan bersatu menyusun rencana aksi yang saling mendukung satu sama lainnya dalam upaya mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah di sekolah formal dan non formal serta mencegah anak beresiko putus sekolah agar tidak putus sekolah. Kolaborasi dilakukan dari hulu ke hilir secara tuntas, mampu mengatasi permasalahan ATS di Sulawesi Selatan.

Walaupun peraturan, kebijakan dan penganggaran di Indonesia secara nasional maupun lokal untuk sektor Pendidikan terus mengalami peningkatan, tapi permasalahan ATS masih besar dan berisiko meningkat karena pandemi. Ada permasalahan sinergi, sinkronisasi koordinasi dan kebijakan serta penganggaran yang tidak efektif dan masih parsial, oleh karena itu Bappelitbangda selaku OPD yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan strategi implementasi melalui pelibatan semua pihak di bidang Pendidikan.

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, maka upaya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Aksi

Kolaborasi merupakan intervensi yang sangat tepat karena bertujuan untuk:

1. Menyediakan sistem pendataan berbasis by name by address.
2. Mengembalikan ATS melalui pelibatan para pihak.
3. Melakukan upaya pencegahan ATS melalui pelibatan para pihak.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Gerakan Bersama PASTI BERAksi. Pendataan dilakukan dengan SIPBM ATS.

Sasaran Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi ini adalah anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dikembalikan ke sekolah formal/non formal di 10 kabupaten/kota.

Inovasi PASTI BERAksi sesuai dengan kategori ke 2 yaitu Efektifitas insitusi publik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Membangun Kolaborasi antar dan inter lingkup Pemerintahan dapat mengefektifkan implementasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan publik sektor Pendidikan.

Nilai kebaruan atau nilai tambah dengan adanya inovasi ini adalah:

1. Pendataan dengan SIPBM ATS berbasis data desa
2. Pembentukan Pokja PPATS secara berjenjang
3. Penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi sebagai dasar Bersama untuk mengimplementasikan PASTI BERAksi
4. Kolaborasi Lintas sektor dan pemangku kepentingan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan mencakup pendataan, penyiapan SDM, dan pengembalian anak ke sekolah.

Signifikansi

Inovasi PASTI BERAksi dilaksanakan secara kolaborasi meliputi :

1. Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan SIPBM ATS berbasis android dengan cara sensus, sasarannya seluruh keluarga guna mencari keberadaan ATS di desa/kelurahan. Pendataan ini menghasilkan data “by name by address”. Pendataan SIPBM-ATS mencakup jumlah ATS, alasan dan berbagai penyebabnya. Hasil pendataan di bahas oleh tim Kabupaten Bersama tim desa dalam pertemuan rekonfirmasi data dan dilaksanakan diidentifikasi ATS yang ingin kembali ke sekolah formal atau non formal.
2. Hasil rekonfirmasi data dilaporkan dan di koordinasikan ke OPD dan instansi vertikal (Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama)
3. Penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi untuk mengembalikan ATS ke sekolah dan pencegahan anak tidak sekolah.
4. Pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah formal dan non formal sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
5. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembalian anak ke sekolah dan pencegahan anak tidak sekolah.

Aksi kolaborasi ini menjadi salah satu pilot project untuk meningkatkan IPM dan Indeks Pendidikan yang disesuaikan dengan kebijakan. Pilot project ini pun diharapkan menjadi acuan bagi seluruh desa dan kelurahan dalam upaya mengembalikan anak tidak sekolah dan mencegah anak tidak sekolah. Inovasi ini berdampak signifikan pada peningkatan angka partisipasi sekolah yang kemudian meningkatkan rata- rata lama sekolah.

Evaluasi internal dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pokja PPATS Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda dengan cara melaksanakan Rapat Tim Pokja PPATS guna mengevaluasi program dan kegiatan internal terkait upaya fasilitasi dan koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Rapat evaluasi internal dilaksanakan 4 kali dalam setahun.

Evaluasi eksternal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Tim PPATS Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari OPD dan para pemangku kepentingan dengan cara melaksanakan Rapat evaluasi Tim

PPATS Provinsi guna mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PPATS provinsi, yaitu evaluasi hasil pendataan SIPBM-ATS, evaluasi tindak lanjut hasil pendataan, dan evaluasi capaian Rata-rata Lama Sekolah, Indeks Pendidikan dan IPM.

Indikator kinerja yang digunakan dan dievaluasi adalah:

1. Jumlah kegiatan yang mendukung PPATS
2. Jumlah Desa yang melaksanakan pendataan SIPBM ATS
3. Jumlah ATS yang terdata
4. Jumlah ATS yang dikembalikan ke sekolah formal
5. Jumlah ATS yang dikembalikan ke sekolah non formal
6. Jumlah Anak yang dicegah putus sekolah
7. Jumlah desa/kelurahan yang melakukan perencanaan pendidikan berbasis data

Terjadi perubahan sebelum adanya inovasi dan sesudah adanya inovasi PASTI BERAksi. Dengan adanya inovasi ini:

1. Desa/kelurahan telah memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan bidang Pendidikan, Kabupaten Pangkep, Sidrap, Wajo, Tana Toraja, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa dan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Dari jumlah ATS yang ditemukan 1.685 orang dan ATS yang dikembalikan sedang dalam proses pengembalian ke sekolah formal dan non formal sebanyak 1.685 orang.
3. Dari keluarga yang beresiko putus sekolah sebanyak 14.612 orang berhasil dicegah sebanyak seluruhnya tidak ada lagi yang putus sekolah.

Dampak kolaborasi yang diperoleh adalah penyelesaian masalah lebih cepat dan tepat sasaran, dapat dibuktikan dengan menurunnya ATS di 10 kabupaten/kota.

Keberhasilan inovasi PASTI BERAksi mendukung pencapaian indikator IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 8,38 menjadi 8,46 pada tahun 2021. Angka Partisipasi Kasar (APK) 86,44 pada tahun 2020 meningkat menjadi 87,07, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 97,98 pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,26, APM SMP/MTs sebesar 76,17 pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,02, APM SMA/MA sebesar 60,32 menjadi 60,35.

Kontribusi terhadap Capaian TPB

Aksi kolaborasi ini menyelesaikan masalah lebih cepat dan tepat dalam mendukung visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan yang tertuang di dalam RPJMD dan juga mendukung tercapainya goal ke-4 SDG's yaitu Pendidikan berkualitas, dimana setiap desa dapat membentuk desa/kelurahan peduli Pendidikan. Aparat desa bersama masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada dengan didampingi oleh tim kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi melakukan pendataan untuk menemukan keberadaan ATS dan mengetahui penyebab ATS.

Adaptabilitas

Inisiasi awal dilakukan pada tahun 2019 di dua kabupaten yaitu kabupaten Bone dan Takalar. kabupaten tersebut melakukan serangkaian kegiatan pendataan di beberapa desa dan melakukan aksi melalui perbaikan perencanaan di desa dan mengembalikan anak ke sekolah. Pada tahun 2020, Pemerintah provinsi melihat aksi kedua kabupaten tersebut sangat baik karena melibatkan multisektor, sehingga dirumuskan regulasi sebagai payung hukum untuk mereplikasi ke semua kabupaten/kota. Pada tahun 2021, pemerintah provinsi mereplikasi di 10 kabupaten/kota (Kabupaten Pangkep, Sidrap, Wajo, Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa dan Kota Makassar) masing-masing 4 desa lokus/kelurahan.

Praktik baik di dua kabupaten baik secara regulasi dan aksi menjadi rujukan utama dalam melakukan replikasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam penanganan anak tidak sekolah. Contoh Surat Edaran kepada seluruh camat, desa dan kelurahan (372 desa/kelurahan) untuk memastikan program pengembalian anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah sebagai program prioritas pada penganggaran dana desa. Memastikan pengembalian anak/remaja bersekolah sebanyak 15-20 orang setiap tahunnya.

Inovasi berpotensi direplikasi di tempat lain yang memiliki tantangan terkait ATS yang tinggi. Inovasi dapat dilaksanakan dengan model koordinasi dan kolaborasi oleh masing-masing Bappelitbangda Provinsi, Bappeda kabupaten/kota, kecamatan hingga ke jenjang desa. Pendampingan persiapan kader SIPBM dapat dikerjasamakan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keberlanjutan

Sumber daya manusia terdiri dari:

1. Provinsi

Tim PPATS Provinsi

Fasilitator : Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Kemenag, NGO/LSM

2. Kabupaten / Kota Tim PPATS Kab/Kota

Fasilitator : Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Kemenag, NGO/LSM Admin SIPBM-ATS Kab/Kota.

3. Kecamatan Desa/Kelurahan

Tim PPATS Kecamatan, desa dan kelurahan Fasilitator : Tim Kab/Kota dan NGO/LSM Pendata SIPBM-ATS Desa Verifikator Admin desa.

Seluruh pihak yang terlibat digerakkan melalui pertemuan koordinasi, monitoring dan pendampingan bersama-sama di kabupaten/kota dan desa/kelurahan lokus.

Sumber daya Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD pada DPA Bappelitbangda Prov. Sulsel pada tahun 2021 sebesar Rp. 402.072.000,- dan juga yang terdapat anggaran di masing-masing OPD terkait yang mendukung pendataan, pengembalian ATS dan pencegahan ATS, disamping itu dana desa/kelurahan dialokasikan untuk penanganan anak tidak sekolah dengan optimal, hal ini menunjukkan desa/kelurahan sangat merespon dan bertanggung jawab akan warganya yang tidak sekolah.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD dan dana desa, juga terdapat sumber anggaran lain yang mendukung

penanganan ATS, yaitu berasal dari perusahaan dan perbankan, misalnya pemberian bantuan beasiswa bagi ATS yang kurang mampu, bantuan transportasi dan peralatan sekolah serta bantuan lainnya.

Strategi keberlanjutan meliputi:

1. Strategi Institusional

Tersedia regulasi untuk mendukung inovasi ;

- Perda Sulsel no. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pergub No 71/2020 terkait Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah SK tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Surat edaran gubernur terkait penggunaan dana desa dalam melakukan pendataan di desa Peraturan Bupati terkait penggunaan dana desa dalam pendataan dan perencanaan aksi pengembalian anak ke sekolah.

2. Strategi Sosial

Strategi Sosial berupa partisipasi dari berbagai pihak;

Pelibatan Orang Tua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Agama Pelibatan TNI dan POLRI

Pelibatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Pusat Pendidikan Keluarga (PUSPAGA) Baznas Perguruan Tinggi LSM dan Pers

3. Strategi Manajerial

Guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dilakukan beberapa pelatihan : Pelatihan tim pendata tingkat provinsi dan kabupaten.

Pelatihan Perangkat Desa dan kader terkait pendataan tentang Pendekatan terhadap anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah, dan penyusunan perencanaan berbasis data di tingkat desa.

Inovasi PASTI BERAksi sangat dibutuhkan guna mendukung keberhasilan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penentu keberhasilan adalah:

1. Dukungan dari pimpinan baik dari provinsi, kab/kota dan pemerintah desa/kelurahan
2. Kolaborasi dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari sector swasta
3. Dukungan APBD, dana Desa dan sumber dana lainnya.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Keberhasilan Inovasi PASTI BERAksi tidak lepas dari kolaborasi berjenjang dari provinsi hingga desa dengan melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kepala Desa. Masing- masing OPD mempunyai tugas

1. Bappelitbangda: memfasilitasi kebijakan dan mengoordinasikan serta mengevaluasi tahapan kegiatan PASTI BERAksi.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: memfasilitasi pendampingan penyusunan peraturan desa tentang PPATS dan memastikan pendataan SIPBM ATS di setiap desa/kelurahan.
3. Dinas Pendidikan : memfasilitasi penemuan ATS, pengembalian ATS ke sekolah.
4. Dinas Sosial: memfasilitasi pemberian bantuan sosial untuk membantu mengurangi pengeluaran keluarga miskin dimana di dalamnya terdapat ATS dan anak yang beresiko putus sekolah.

5. Kementerian Agama : memfasilitasi advokasi, sosialisasi dan edukasi terhadap para tokoh Agama termasuk tentang pencegahan pernikahan anak yang menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.
6. NGO yaitu UNICEF: memfasilitasi pelatihan pendata SIPBM-ATS kabupaten/kota.

Pemangku kepentingan yang terlibat di kabupaten/kecamatan dan desa/kelurahan:

1. Bappelitbangda: memfasilitasi kebijakan dan mengoordinasikan serta mengevaluasi tahapan kegiatan Inovasi PASTI BERAksi
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kemenag berkolaborasi mulai pendataan, rekonfirmasi data, koordinasi, pengembalian ATS ke sekolah dan pencegahan ATS.

Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyusun regulasi/kebijakan PPATS, menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDs yang terintegrasi PPATS serta menyelesaikan tahapan PPATS.